



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BIMA
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SUB UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ZAINAB
2. Jabatan : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. NIK : 33388

II. DATA HARTA

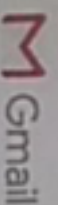
A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.305.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m ² /100 m ² di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah Seluas 400 m ² di BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000		
3. Tanah Seluas 384 m ² di DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
4. Tanah Seluas 380 m ² di DOMPU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m ² /100 m ² di KOTA BIMA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	50.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
2. MOBIL, ISUZU MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
3. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, SUZUKI SATRIA FU SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	149.740.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.681.550
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—



Sub Total	Rp.	1.515.921.850
BL HUTANG	Rp.	210.585.252
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (B-0)	Rp.	1.305.335.298

Catatan

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dibuat secara otomatis oleh e-lhkn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirmkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui e-lhkn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Kekuwanya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitas pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENOKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal 18 November 2019.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dibuat secara otomatis.



Pengumuman Harta Kekayaan PN

1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <report.ehkpn@kpk.go.id>
Kepada: maarifaruf@gmail.com

15 April

**Yth. Sdr. MAARUF
PEMERINTAH KOTA BIMA
Di Tempat**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dua kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemerkasaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Wajib LHKPN berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Bersama ini disampaikan bahwa kami telah mengumumkan harta kekayaan Saudara dalam Lembar Pengumuman (terlampir) sebagai berikut.

NIK : 527205112060013
Jenis Laporan : Perodik
Tanggal Kirim : 11-03-2020
Nomor Harta Kekayaan (N-HK) : 451676

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email ehkpn@kpk.go.id atau Call Center 198. Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih.

Direktoral Pendaftaran dan Pemerkasaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

@ 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id | ehkpn@kpk.go.id | Call Center 198

Informasi yang terdapat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan terakap. Jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau menuh dengan kerass DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini sepenuhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Seliabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : NENENG HALIDAH
NIK : 5272014402820006
Lembaga : PEMERINTAH KOTA BIMA
Unit Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT
Jabatan : BENDAHARA
Jenis Laporan : Khusus - Awal Menjabat
Tanggal Kirim : 11 Maret 2020

Catatan Hasil Verifikasi Administrasi:

- Lengkap
 Tidak Lengkap



**] Lembar ini adalah bukti resmi penyampaian LHKPN setelah melalui proses verifikasi administrasi.*

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.